PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KONSEP *ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT* DALAM MENGEMBANGKAN USAHA BUMDES DI DESA RANGA KABUPATEN ENREKANG

Nur Rahmadani[1], Hernianti Harun[2]
Email: rahmadaninur298@gmail.com[1], herniantiharunanty@gmail.com[2]
[1]Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
[2]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Masih tingginya jumlah BUMDes yang dikategorikan belum mampu memberikan partisipasi terhadap perekonomian yang ada di Desa bahwa salah satu bentuk kegagalan dari BUMDes dalam memberikan dukungan terhadap pendapatan desa karena kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang BUMDes dan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk Pendekatan dalam Konsep *Asset Based Community Development* sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan usaha BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dan hasil yang diperoleh bahwa konsep *asset based community development* merupakan sebuah model pemberdayaan untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam menentukan Usaha BUMDes yang dianggap potensial melalui konsep *asset based community development* maka BUMDes Ranga telah dapat mempetakan potensi-potensi yang dianggap layak untuk dikembangkan menjadi usaha BUMDes diantaranya optimaliasasi hasil panen jagung, pengelolaan peternakan sapi, pengembangan usaha untuk tanaman kelapa dan gula aren, sedangkan beberapa usaha rintisan didasarkan potensi yang dilimiliki oleh Desa Ranga antara lain Pengelolaan buah pisang, briket tongkol jagung dan pembuatan wadah tanam dari sabuk kelapan. Model Pemberdayaan pada konsep *asset based community development* merupakan pendekatan pengembangan usaha yang melihat dan memanfaatkan peran masyarakat dalam menentukan usaha yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa melalui konsep ini secara langsung atau tidak langsung maka partisipasi masyarakat dapat dikembangkan.

Kata Kunci: Partisipasi, *Asset Based Community Development*, BUMDes

PENDAHULUAN

Pencanangan Program “Nawacita” atau 9 Program Unggulan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, salah satunya mencanangkan Program Membangun dari Dari Daerah Pinggiran dan Pedesaan, program ini dimaksudkan untuk mendorong agar peran Desa menjadi lebih strategis khususnya dibidang perekonomian. Melalui program ini pulalah yang menjadi salah satu pemicu sehiggga Diksi tentang Desa, Pedesaan, dan Perdesaan telah menjadi sebuah istilah popular yang digunakan dalam rangka mendorong peningkatan siklus perekonomian di Indonesia, terlebih lagi setelah dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi tonggak baru dalam rangka merubah perwajahan Desa yang dulunya lebih dominan sebagai objek dari pelaksanaan pembangunan, kemudian melalui langkah ini maka Peran Desa ditingkatkan menjadi Subjek dari Pembangunan.

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan status daerah-daerah pedesaan menurut Ervin (2023) yakni mendorong agar semua desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Desa, kemudian

diayomi oleh beberapa aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang secara teknis mengatur tentang Mekanisme Pembentukan BUMDes. Pertimbangan ini dilakukan oleh pemerintah melihat bahwa selama ini banyaknya program yang dicanangkan untuk desa menjadi tidak maksimal karena intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Kemudian mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian desa.

Gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa khususnya di sektor perekonomian karena menurut Peni Alvera (2021) hal ini masih menjadi titik lemah pada masyarakat dipedesaan, sehingga diperlukan berbagai langkah sistematis untuk mendorong keberadaan sebuah organisasi agar dapat mengelola aset strategis di desa melalui pengembangan jaringan demi meningkatkan daya saing ekonomi dipedesaan, salah satunya yakni melalui pembentukan BUMDes. Mempertegas penjelasan tersebut Ningsih Wahyuni (2023) mengemukakan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Sementara dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Suleman (2020) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekoniomian di desa yang dibentuk berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. Sementara cara kerja dari BUMDes itu sendiri yakni menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi desa. Tentunya hal ini diharapkan dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif.

Kinasih (2020) dalam kajian penelitiannya juga menegaskan bahwa BUMDes sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa, maka keberadaannya juga diharapkan mampu mendorong pola pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, sehingga dampaknya menjadi semakin luas, yakni mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Rilis dari terakhir Kementerian Desa menguraikan bahwa dari data Disduk Capil Tahun 2021 terdapat 83.381 desa, sementara yang mendapatkan Dana Desa yakni sebanya 75.259 Desa, dari jumlah tersebut baru tercatat sebanyak 65.941 Desa yang memiliki BUMDes, artinya masih terdapat 9.318 Desa yang dianggap belum melakukan pembentukan BUMDes. Adapun yang telah memiliki status berbadan hukum baru tercatat 18.850 dari 52.776 BUMDes yang mengajukan permohonan (Detik.com. 2024). Sementara untuk melihat tingkat partisipasi BUMDes dalam Perekonomian Pedesaan, sesuai hasil Pemeringkatan BUMDes yang ditetapkan melalu Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 bahwa Kondisi BUMDes saat ini sesuai dengan statusnya bahwa dari 65.941 Desa yang telah memiliki BUMDes, 18.243 dikategorikan telah mampu memberikan sumbangsih pada Perekonomian Desa, sementara 12.040 BUMDes dinyatakan Tidak Aktif, artinya 35.658 BUMDes telah aktif namun belum mampu memberikan partisipasi pada Pemerintah Desa secara maksimal.

Menurut Irfan Irenius (2024), masih tingginya jumlah BUMDes yang belum mampu berkontribusi terhadap perekonomian desa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Akibatnya, masyarakat kurang memahami peran dan fungsi BUMDes, yang berujung pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam pengembangannya. Hal ini menjadi salah satu faktor utama kegagalan BUMDes dalam mendukung peningkatan pendapatan desa. Mempertegas hal tersebut Lindi Widiastuti (2022) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa penyebab dari rendahnya partisipasi dari masyarakat, secara umum disebabkan oleh tidak jelasnya kesejahteraan yang akan diperoleh ketika terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sikap semacam ini menurut Syarifuddin Yusuf (2023) merupakan salah satu bentuk dari *Job Insecurity* atau adanya ketidak nyamanan dalam sebuah pekerjaan membuat seseorang merasa enggan untuk berpartisipasi, artinya bahwal loyalitas masyarakat yang dituangkan dalam bentuk partisipasi akan semakin tinggi jika mereka melihat bahwa dalam pengelolaan BUMDes mereka akan memperoleh kesejahteraan.

Makna partisipasi yang dimaksudkan dalam hal pengelolaan BUMDes menurut Budi Sunarso (2023) dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan pada pencapaian

tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung jawab pada usaha yang dikembangkan. Sedangkan dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Siti Amerieska (2023) bahwa banyaknya BUMDes yang belum mampu untuk memberikan konstribusi terhadap perekonomian di desa, selain tingkat partisipasi yang masih rendah juga dikarenakan BUMDes belum mampu untuk mengptimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, sebab asumsi yang terbangun ketika membahasakan tentang potensi, maka orientasi masyarakat hanya terpaku pada potensi alam saja dengan mengabaikan semua faktor-faktor potensi lain seperti kondisi sarana-prasarana serta kultur di daerah tersebut.

Penegasan tentang makna potensi sebenarnya sangat jelas diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut Tatang (2023) bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Kondisi inilah yang terjadi di Desa Ranga, dimana semua unsur yang menjadi bagian dari Potensi Desa belum mampu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis karena sinergitas antara BUMDes, Pemerintah Desa dan Masyarakat tidak terbangun secara baik. Gambaran tersebut sangat jelas terlihat dari bentuk usaha yang saat ini dikelola oleh BUMDes yakni penyewaan Moleng dan Usaha Rias Pengantin, dimana kedua usaha tesebut jika ditinjau dari sudut pandang pemanfaatan potensi yang ada di desa maka nilainya dapat dikatakan sangat rendah. Menyikapi permasalahan tersebut dan setelah dilakukan observasi awal dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka hal paling utama yang ditemui bahwa masyarakat secara umum memiliki nilai antusias untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes, akan tetapi mereka melihat tidak adanya wadah melibatkan diri secara aktif dalam memberikan dukungan secara optimal, sebab semua bentuk usaha yang dikelola oleh BUMDes sifatnya personal, artinya tidak dapat dikelola dan dikembangkan secara bersama-sama dan penggunaannya hanya pada momen-momen tertentu dan imbasnya secara langsung kepada masyarakat juga sangat rendah.

Kondisi semacam inilah yang ditekankan oleh Sihabudin (2021) dalam penelitiannya yang mana ditemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh BUMDes penyebabnya tidak semata-mata pada persoalan tidak aktifnya pengurus atau rendahnya partisipasi masyarakat, akan tetapi letak permasalahan utamanya karena usaha yang dikembangkan BUMDes belum berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa didasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasar pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oeh BUMDes Desa Ranga, dan menyikapi kondisi pengelolaan usaha yang dikembangkan saat ini, oleh Taufik Raharjo (2021) melihat bahwa pola pendekatan atau langkah kongkrit yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes yakni mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa, dan salah satu konsep untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut menurut Kiky Srirejeki, dkk (2020) adalah optimalisasi pemanfaatan semua jenis potensi melalui konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa atau sering diistilahkan dengan Konsep *Asset Based Community Development,* dimana melalui konsep ini semua bentuk potensi yang ada didesa terpetakan dan dan dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan usaha BUMDes.

Konsep *Asset Based Community Development* atau Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi menurut Hidayati, dkk (2022) adalah sebuah model yang menggagas bagaimana inspirasi pemanfaatan potensi yang ada di desa lebih bersifat usulan atau inspirasi dari masyarakat, kemudian pihak Pemerintah Desa dan BUMDes meramu usulan dari masyarakat dalam bentuk program, sehingga malalui konsep ini maka penguatan dari masyarakat akan lebih besar karena mereka merasa bahwa program yang dijalankan adalah hasil dari usulan dan keinginan mereka. Pendekatan ini tidak hanya memandang masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kekayaan dan potensi untuk dapat dikembangkan kaitannya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Wawan H. S. (2022) juga mengemukakan bahwa kerangka konsep yang hendak dibangun melalui pendekatan *Asset Based Community Development* sesuai maksud dari Kretzmann & McKnight (1993) yang merupakan pencetus model ini, melihat bahwa setiap anggota masyarakat dianggap memiliki kapasitas untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan usaha BUMDes, sehinga melalui konsep ini dinyatakan bahwa setiap anggota

masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan BUMDes secara berkelanjutan. Megoptimalkan pemanfaatan semua jenis potensi yang dimiliki sebuah desa sehingga dapat bernilai ekonomis, sesuai dengan Konsep *Asset Based Community Development* menurut Faradhilla Andriyani (2020) tidak akan dapat tercapai jika hanya dilakukan secara parsial saja, misalnya keinginan tersebut hanya berasal dari BUMDes atau Pemerintah saja, akan tetapi keterlibatan semua unsur baik itu BUMDes, Pemerintah maupun Masyarakat harus menjadi sebuah kesatuan yang utuh, sehingga semua bentuk optimalisasi dapat berjalan dan menghasilkan manfaat bagi semua pihak khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterpaduan antar semua elemen juga diuraikan oleh Syarifudin Yusuf (2022) dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bahwa untuk mendukung pengembangan usaha sebuah BUMDes maka langkah yang perlu dilakukan yakni sinkronisasi program, peningkatan partisipasi dan kreasi masyarakat untuk memajukan sektor-sektor unggulan desa dan penambahan daya ungkit dengan masuk ke *supply chain* yang lebih luas sehingga bisa *up-skilling* atau meningkatkan kemampuan usaha BUMDes melalui konsep pemberdayaan potensi. Mempertegas pernyataan tersebut oleh Azis (2024) bahwa dalam konsep *Asset Based Community Development*, bentuk *Up-Skilling* juga menjadi bagian dalam perencanaan sebuah uaha khususnya terkait dengan perilaku pembiayaan yang umum terjadi dimasyarakat, artinya melalui konsep ini maka masyarakat juga diajak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan sebuah usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian. Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Konsep *Asset Based Community Development*, **maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalian informasi** terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : Kepala Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, dan Pengelola BUMDes Desa Ranga.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Rangkaian Analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
   Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi Data
   Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
   Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi Perkembangan BUMDes Desa Ranga

BUMDes yang ada di Desa Ranga terbentuk pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 04/05/11/2015 dan selanjutnya diberi nama “BUMDes Ranga”. Tahun 2022 ketika BUMDes diwajibkan untuk berbadan Hukum maka melalui hasil Musyawarah Desa yag ditindak lanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, maka dilakukan perubahan nama menjadi “BUMDes Sipatokkon”. Perkembangan dan Jenis Usaha yang dikelola oleh BUMDes Ranga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Tahapan Pengembangan Usaha BUMDes Desa Ranga

Tahun	Penjelasan
2015	Terbentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 04/05/11/2015 dan selanjutnya diberi nama “BUMDes Ranga”
2015	Usaha Pertama yang dilakukan BUMDes adalah 1. Penyewaan Moleng Jumlah unit yang dimiliki oleh BUMDes sebanyak 2 (Dua) Unit dengan Nilai Perolehan 31.500.000,- Alat Ini masih ada sampai sekarang, namun tingkat penghasilan mereka menyusut secara drastis karena sudah tidak banyak lagi masyarakat menggunakannya. 2. Dekor Pengantin Alat Dekor Pengantin ini pada dasarnya masih berjalan dan bahkan dipersewakan hingga diluar kota, akan tetapi tingkat pendapatannya juga tidak lagi banyak, sehingga hanya mampu menutupi biaya operasional usaha.
2022	Tertanggal 21 Juni 2022, berdasar pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kemudia diterbitkan Serifikat untuk BUMDes Sipatokkon dengan Nomor Badan Hukum : AHU-04902.AH.01.33 Tahun 2022, berdasar pada ketentuan inilah maka sejak Tahun 2022 BUMDes Ranga berubah menjadi BUMDes Sipatokkon Ranga, hanya saja dalam hal bentuk penyebutan oleh masyarakat masih dikenal dengan nama BUMDes Ranga. Pengusulan untuk permohonan Badan Hukum BUMDes dilakukan setelah adanya pembentukan Pengurus Baru yang dilakukan pada awal Tahun 2022 dan diputuskan bersama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes melalui Peraturan Desa Ranga Nomor 05 Tahun 2022. Sementara untuk unit usaha juga dilakukan penambahan dari awalnya hany berfokus pada Penyewaan Moleng dan Usaha Rias Pengantin, kemudian ditambahkan lagi usaha Simpan Pinjam, dimana usaha ini efektif dilaksanakan setelah diternitkannya Setifikat Badan Hukum BUMDes Desa Ranga, karena menjadi dasar dalam pembentukan usaha Simpan Pinjam sekaligus dijadikan sebagai legitimasi usaha
2022	Pembentukan Usaha SIMPAN PINJAM yang diawali dengan Modal 50 Juta.

Pencermatan yang dilakukan terhadap kondisi BUMDes Ranga, khususnya untuk unit usaha yang dikembangkan diketahui bahwa Unit Usaha Penyewaan Moleng dan Dekor Pengantin untuk saat ini tidak lagi berjalan optimal, olehnya itu Kepala Desa pada saat dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes menyatakan :

> “BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih bejalan, hal tersebut dapat dilihat bahwa semua pengurus masih lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris,

Bendahara dan juga Manager-Manager Unit Usaha, hanya saja permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus BUMDes yakni belum adanya Konsep Usaha yang dapat diyakini untuk dikembangkan dan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat"

"Terhadap usaha yang ada saat ini, karena pasca pergantian pengurus terjadi polemik, maka oleh Pihak Pemerintah Desa menyarankan kepada Pengurus BUMDes, sekiranya dapat mengusahakan bentuk kegiatan lainnya yang dianggap betul-betul dapat meningkatkan pendapatan dari BUMDes"

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa juga dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Ranga, dimana pada saat dipertanyakan tentang tingkat partisipasi dari masyarakat serta beberapa problematikanya dalam rangka mendukung aktivitas dari BUMDes maka diperoleh pernyataan sebagai berikut :

"Masyarakat yang ada di Desa Ranga secara umum sering mempertanyakan fungsi dari keberadaan BUMDes, sebab mereka melihat bahwa peran yang diberikan selama ini belum mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga jika dikatakan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi, hal tersebut tentunya akan disangkal oleh masyarakat, sebab oleh Pemerintah Desa bersama semua aparat mengakui secara terbuka bahwa peran BUMDes memang belum nampak, apalagi usaha yang dikelolapun dapat dikatakan sudah jarang terpakai."

Sementara disisi lain Sekretaris Desa Ranga, melihat permasalahan BUMDes Ranga dalam sudut pandang berbeda, dimana ketika dilakukan wawancara terdapat beberapa gambaran dalam bentuk ide dan gagasan sehubungan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BUMDes Ranga, dimana sudut pandang yang dikemukakan oleh Sekretarsi Desa yakni :

"BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih lebih baik dibanding beberapa BUMDes lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang, sebab kepengurusannya masih lengkap, hanya saja konsep usaha yang dikembangkan saat ini harus diakui belum bersentuhan langsung terhadap tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga jika dipertanyakan tentang partisipasi masyarakat, maka untuk hal tersebut dapat dikatakan rendah, namun kesemuanya terjadi karena Usaha yang dikelola BUMDes juga tidak memberikan ruang pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi."

"Sementara melihat tentang usaha-usaha yang sekiranya dapat dikelola oleh BUMDes sebenarnya cukup banyak, akan tetapi konsep terhadap usaha yang dapat dikelola atau dikembangkan BUMDes, baik Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDes sendiri belum memahaminya secara utuh, sementara disisi lain Pendanaan terhadap usaha yang dianggap dapat memberikan keuntungan pada BUMDes oleh Pemerintah Desa bersedia memberikan dukungan.

Menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Ranga, dapat diketahui bahwa hal utama yang dihadapi yakni belum adanya inovasi dari BUMDes dalam mengembangkan usaha selain usaha yang ada saat ini. Sementara ketika pertanyaan diarahkan tentang Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes oleh Kepala Desa Ranga, Sekretaris dan juga Ketua BPD serta Pengelola BUMDes memberikan tanggapan tanggapan yang hampir seragam, dimana mereka menyatakan bahwa :

"Usaha BUMDes memang seharusnya berorientasi pada potensi yang ada di Desa khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang cukup melimpah di Desa Ranga, hanya saja persoalan ini kembali diperhadapkan pada model usaha yang layak dikelola, dan tentunya dalam menentukan jenis usaha sangat disadari perlu adanya analisis walaupun sifatnya mendasar, namun dapat dijadikan acuan sebagai dasar mengembangkan sebuah usaha"

Berdasar pada harapan yang diinginkan oleh semua pihak khususnya para pemangku kebijakan di Desa Ranga termasuk dalam hal ini pengurus BUMDes, kemudian melihat peroblematika terhadap mekanisme penentuan usaha yang dinilai layak untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka salah satu pendekatan yang dianggap relevan terhadap penanganan masalah tersebut yakni melalui Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi atau dikenal dengan Model *Asset Based Community Development*.

Pengembangan Usaha BUMDes melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

a. Analisis Pemetaan Potensi dan Permasalahan Masyarakat melalui Pendekatan Model *Discovery*

Berkembang atau tidaknya sebuah BUMDes tentunya akan sangat tergantung pada Usaha yang dikelola serta peran aktif Masyarakat dalam mengoptimalkan Usaha BUMDes. Sementara jika mencermati Kondisi BUMDes Desa Ranga walaupun dapat dikategorikan masih aktif dan Kepengurusan juga masih berjalan, namun dari sisi usaha yang dikelola dianggap belum mampu untuk memberikan dukungan secara optimal dan bahkan terkesan saat ini terdapat polemik terhadap Asset BUMDes. Hasil pemetaan ini tentunya memiliki korelasi sangat kuat dengan persoalan Pengembangan Usaha BUMDes, sebab dari kondisi keberadaan SDM dan SDA yang ada di Desa Ranga, maka arah analisis pengelolaan sebuah usaha dapat dilakukan secara jelas dan terarah, sehingga tujuan untuk meningkatkan keejahteraan dari masyarakat dapat tercapai. Langkah lainnya dalam konsep ini adalah memetakan berbagai bentuk permasalahan utama yang ada di masyarakat melalui pendekatan Aspek-Aspek sebagaimana dijadikan acuan dalam Konsep *Asset Based Community Development*, maka setelah dilakukan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dimasyarakat, maka hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2 : Hasil Analisis Aspek-Aspek pada Pendekatan *Asset Based Community Development*

No	Aspek-Aspek *Asset Based Community Development*	Analisis Kondisi
1	*Problem Based Approach (Pendekatan Berbasis Masalah)*	1. Kesejahteraan Masyarakat Masih Sangat Perlu ditingkatkan karena tingkat pengha silan sebahagian besar masyarakat masih dibawah standar. 2. Dukungan terhadap Penghasilan Utama Masyarakat yakni Sektor Pertanian khususnya Pengelolaan Tanaman Jagung belum Memadai 3. Harga Produk Pertanian Khususnya Jagung Tidak Merata, masih menjadi bagian dari Permainan Pedagang 4. Biaya Produksi Mulai dari Proses Tanam dan Perumbuhan Produk Pertanian masih sangat besar, Karena suplai Pupuk harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan 5. Petani masih banyak terjerat oleh Permainan Tengkulak 6. Biaya untuk Proses Panen cukup tinggi karena masih harus menyewa mesin perontok jagung dari Ibukota Kecamatan 7. Masih banyaknya Potensi Sumber Daya Alam yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan Tambahan 8. Tidak diberdayakannya ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis 9. Tidak adanya lembaga yang dapat menjadi mediator terhadap pemanfaatan potensi yang ada di desa. 10. Peran BUMDes dalam memberdayakan Potensi Desa belum maksimal 11. Kemampuan BUMDes dan Pemerintah Desa dalam menentukan Usaha yang layak belum menemukan solusi terbaik
2	*Need Based Approach* (Pendekatan Berbasis Kebutuhan)	1. Peningkatan Mutu Hasil Panen Tanaman Pertanian 2. Tersedianya faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan hasil panen masyarakat 3. Tersedianya Fasilitas-Fasilitas yang dapat memper mudah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 4. Meningkatnya Taraf Penghasilan Masyarakat 5. Mengembangkan Kemampuan BUMDes dalam melakukan Analisis terhadap Pemanfaatan Potensi Desa sebagai Unit Usaha
3	*Right Based Approach* (Pendekatan Berbasis Hak)	1. Kepedulian Pemerintah Desa Sangat baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Kepedulian Pemerintah dalam menyediakan kemudahan terhadap kebutuhan faktor-faktor produksi dalam pengelolaan pertanian cukup besar melalui beberapa langkah seperti pengadaan Bibit dan lain-lain 3. Pemerintah diharapkan mampu membangun kemitraan terhadap pihak terkait dalam rangka mendukung keterpenuhan kebutuhan

		masyarakat dalam hal pengembangan usaha 4. Meningatkan peran dari Lembaga Ekonomi Desa dalam hal ini BUMDes sebagai sarana Pengembangan Potensi yang ada di Desa
4	*Aset Based Approach* (Pendekatan Berbasis Aset)	1. Desa Ranga merupakan salah satu bagian dari Desa Adat di Enrekang 2. Modal Sosial di Masyarakat masih sangat tinggi 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Kebi jakan Pemerintah Masih Cukup Tinggi 4. Kepekaan Sosial Masyarakat masih terjaga dengan baik

Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Mengacu pada kondisi permasalahan yang ditemukan setelah dilakukan wawancara dengan berbagai unsur di Desa Ranga dan mencermati peran dari Pemangku Kebijakan, maka hal inilah nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan dikombinasikan antara keinginan masyarakat, potensi yang dimiliki oleh Desa dan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes.

b. Analisis Konsep *Dream* (Membangun Harapan)

Membangun sebuah harapan tentunya harus memiliki dasar dalam penetapannya. Olehnya itu mendukung harapan dari masyarakat maka hasil analisis terhadap jenis potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga dan mencermati keinginan dari masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3 : Hasil Analisis Langkah *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan)

No	*Discovery* (Memetakan Potensi)	*Dream* (Membangun Mimpi/Harapan)
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	1. Harga Penjualan Merata 2. Pemasaran Produk Jelas 3. Adanya Dukungan Bibit dan Pupuk 4. Tersedianya Pinjaman Lunak dengan Jaminan Hasil Panen menghindari peran Tengkulak 5. Tersedianya Mesin Perontok Jagung yang dapat disewakan 6. Pemanfaatan Limbah (Tongkol Jagung yang hanya menjadi sampah setelah Panen untuk dijadikan sebagai potensi bernilai ekonomis
2	Produksi Tanaman Kemiri	1. Penyediaan Mesin Pemecah Buah Kemiri 2. Pemasaran Produk Kemiri 3. Inovasi Olahan Kemiri 4. Pemanfaatan Limbah Kulit Kemiri
3	UMKM Terdiri dari : Toko Kelontong Home Industry Pembuatan Keripik	1. Menyediakan Pusat Pertokoan untuk Melayani Toko-Toko Kecil dan UMKM lainnya. 2. Menjadi Mitra dari Pengelolaan Home Industry 3. Penyeddiaan Kredit Lunak bagi UMKM
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk Rata-rata : 400 Liter/Perminggu	1. Pemasaran Produk 2. Inovasi Produk Menjadi Gula Semut 3. Penyediaan Mesin Oven
5	Peternakan Sapi	1. Penggemukan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil 2. Bantuan Indukan Sapi Ternak dengan Sistem Bagi Hasil 3. Bantuan Indukan Sapi Perah untuk Pembuatan Dangke 4. Pembuatan Pupuk Organik
6	Pengembangan Destinasi Wisata - Panorama Alam Buttu Lanja	1. Membangun Resource Tempat Peristirahatan di Buttu Lanja 2. Menyediakan Sarana Fotoboot 3. Melakukan Even Wisata Kuliner
7	Buah Pisang	1. Inovasi Pemanfaatan Buah Pisang melalui Pembuatan Kripik (Buah dan Kulit Pisang) 2. Pelatihan Pengolahan Batang Pisang Menjadi Pupuk Organik
8	Tanaman Kelapa	1. Pemasaran Buah Kelapa 2. Pemanfaatan Sampah Kelapa sebagai Media Tanam (Sabuk Kelapa)
9	Pembuatan Briket	1. Pemanfaatan Limbah Jagung 2. Pemanfaatan Limbah Kemiri 3. Pemanfaatan Limbah Kelapa

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Merujuk pada hasil analisis ini kemudian dilakukan pencermatan oleh Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa, untuk disusun dalam sebuah bentuk perencanaan usaha yang nantinya hasil analis tersebut akan kembali disampaikan kepada masyarakat bersama dengan alasan atau argument mengapa jenis usaha tersebut diajukan sebagai alternatif pengembangan BUMDes.

c. Analisis Konsep *Design* (Merencanakan Tindakan)

Hasil analisis terhadap semua jenis potensi yang telah terpetakan melalui konsep *Discovery* dan *Dream*, oleh pihak BUMDes dan Pemerintah Desa mampu mempetakan beberapa jenis usaha unggulan untuk selanjutnya diusulkan kembali kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan terhadap pelaksanaannya kedepan. Perencanaan usaha yang telah disusun oleh BUMDes dan Pemerintah Desa sesuai dengan Skala Prioritasnya dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 4 : Perencanaan Usaha dengan Pendekatan Konsep *Design* (Merencanakan Tindakan)

No	Jenis Potensi	Bentuk Usaha
	Skala Prioritas Usaha	**Unggulan**
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	Jenis Usaha : **Usaha *Brokering* (Perantara)** Bentuk Usaha **Pembelian dan Penjualan Hasil Panen Jagung Petani** Usaha Tambahan **Penyediaan Mesin Perontok Jagung setia Dusun**
2	Peternakan Sapi	Potensi Jumlah Peternak : **175 Kepala Keluarga** Jenis Usaha : ***Bolding* (Usaha Bersama)** Bentuk Usaha : **Penggemukan Sapi** Model Usaha : **Penyediaan Bibit/Anakan Sapi**
3	Tanaman Kelapa	Jumlah Kepala Keluarga : **399 Kepala Keluarga** Populasi Tanaman Kelapa **Rata-rata 5-10 Pohon Per KK** Jenis Usaha : **Usaha *Brokering* (Perantara)** Bentuk Usaha : **Penjualan Buah Kelapa**
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 500 Liter/Perminggu	Jumlah Pengrajin **Setiap Dusun rata-rata 2 Orang** Jumlah Produksi : **65 Kilo Perminggu** Jenis Usaha : ***Renting* (Usaha Penyewaan)** Bentuk Usaha Penyewaan Mesin Oven Gula Semut
	Skala Usaha	**Rintisan**
1	Buah Pisang	Jumlah Kepala Keluarga : **399 Kepala Keluarga** Populasi Tanaman Pisang **Rata-rata 10-20 Pohon Per KK** Jenis Usaha : **Usaha Sosial** Bentuk Usaha : **Home Industry** Model Usaha : **Inovasi Produk Buah Pisang**
2	Briket	Bahan Baku : **Tongkol Jagung, Kulit Kemiri** Jenis Usaha : **Usaha Sosial** Bentuk Usaha : **Pembuatan Briket**
3	Pembuatan Wadah Tanam	Bahan Baku : **Sabuk Kelapa** Jenis Usaha : **Usaha Sosial** Bentuk Usaha : **Pembuatan Wadah Tanam**

Sumber : Hasil Analisis Potensi Desa

Dari 9 (Sembilan) Jenis Potensi yang terpetakan, setelah pihak BUMDes dan Pemerintah Desa melakukan kajian dengan mempertimbangkan semua bentuk kemampuan dan juga ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan, maka hasil analisis ini mempertimbangkan pemanfaatan dari beberapa jenis potensi yang dimiliki oleh desa Ranga. Bentuk pengembangan yang akan dilakukan terhadap potensi seperti Jagung, Tanaman Kelapa, Pengelolaan Gula Aren, dan Usaha Bidang Penggemukan Sapi dikategorikan menjadi Skala Prioritas Unggulan, artinya usaha yang akan memanfaatkan potensi tersebut diprioritaskan untuk dikelola karena selain berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat juga melalui usaha ini diharapkan dapat mendukung usaha lainnya yang bersifat rintisan.

d. Analisis Konsep *Define* (Menggalang Kekuatan)

Konsep *Define* adalah rangkaian dari kegiatan dengan pendekatan *Asset Based Community Development,* dimana pada tahapan ini konsep perencanaan yang telah disusun

oleh BUMDes dan Pemerintah Desa selanjutnya disampaikan kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan dan sebagai bentuk penguatan bahwa semua usaha yang akan dikelola BUMDes inspirasinya berasal dari masyarakat. Penguatan yang dibutuhkan dari masyarakat tentunya tidak hanya didasarkan pada sebuah konsep usaha, namun lebih pada berbagai bentuk analisis yang mendasari terutama untuk faktor pembiayaan serta kesanggupan dari pemerintah desa mendukung sektor pendanaan terhadap usaha yang dijadikan sebagai skala prioritas. Mendasari pelaksanaan konsep Define (Menggalang Kekuatan) dari masyarakat, maka hasil analisis yang dijadikan acuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Analisis Pengembangan Usaha Bidang *Brokering*.

Jenis Potensi			**Bentuk Usaha**
Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	Jenis Usaha Bentuk Usaha Usaha Tambahan	: : :	**Usaha *Brokering* (Perantara)** **Pembelian dan Penjualan Hasil Panen Jagung Petani** **Penyediaan Mesin Perontok Jagung setia Dusun**

Analisis Permasalahan :
a. Harga Pembelian dari Pedagang Tidak Merata
b. Selisih Harga Beli Pedagang dengan Harga di Pasaran Cukup Tinggi
c. Petani terkadang membutuhkan Dana Pinjaman Lunak dengan memberikan Jaminan Hasil Panen, sehingga membuat Petani harus berhubungan dengan Tengkulak
d. Petani diperhadapkan pada Kebutuhan yang sifatnya mendesak
e. Biaya Produksi seperti Bibit dan Pemeliharaan Masih Menjadi Beban cukup besar bagi Petani
f. Biaya Produksi Hasil Panen khususnya untuk Penggunaan Mesin Pengupas Jagung harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan yang jaraknya sekitar 9 Km, sehingga biayanya cukup besar.
g. Kemitraan dengan Pengusaha Pakan terhambat dengan keberadaan Pedagang dan Tengkulak
Analisis Pertimbangan Usaha
a. BUMDes dapat menstabilkan harga beli di Petani
b. Proses Pembelian dan Proses Penjualan yang dilakukan BUMDes dapat menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat
c. BUMDes dapat menyediakan Pinjaman Lunak Kepada Petani dengan Jaminan Hasil Panen, sehingga Petani terhindar dari Permainan Para Tengkulak
d. BUMDes dapat menyediakan beberapa Fasilitas seperti Bibit, Pupuk dan Mesin Pengupas Jagung
e. Pemasaran Jagung Petani menjadi Jelas
f. Petani dapat meningkatkan Taraf Penghasilan Mereka
Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes
a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Jagung
b. Penjualan Bibit dan Pupuk
c. Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Analisis Pembiayaan	
Pembelian dan Penjualan Jagung	
Hasil Panen Jagung Petani Desa Ranga (Rata-Rata Setiap Tahun)	1.750 Ton
	1.750.000,-/Kg
Harga Beli Pedagang/Tengkulak	3.200-3.500,-/Kg
Harga Beli Pasaran	4.500,-/Kg
Harga Beli yang dapat ditawarkan BUMDes	3.700-4.000,-/Kg
Keuntungan Petani (Bertambah)	**500-800,-/Kg**
Keuntungan BUMDes (Selisih Penjualan)	**500-800,-/Kg**
Penyewaan Mesin Pengupas Jagung	
Harga Mesin	**10.500.000,-/Unit**
Biaya Sewa Mesin	**50.000,-/Ton**
Target Pengembalian Modal Mesin	**250 Ton Jagung**

Dasar usaha ini dijadikan sebagai salah satu usaha yang diperioritaskan untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes, selain didasari oleh beberapa pertimbangan mengenai kondisi dimasyarakat, juga prtimbangan lainnya bahwa usaha ini lebih dominan mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan mereka dari praktek para tengkulak. Bentuk pemberdayaan lainnya dapat pula dilihat dari usaha tambahan yang masih menjadi rangkaian dan tidak terpisahkan dengan permasalahan pengelolaan hasil

dari Panen Jagung petani, yakni Pengadaan Mesin Perontok Jagung yang akan dipersewakan kepada masyarakat, Konsep penyewaan ini pada dasarnya juga memberikan kemudahan dalam hal pembayaran, dimana sistemnya dapat dilakukan setelah masyarakat melakukan penjualan hasil panennya.

Jenis Potensi			**Bentuk Usaha**
Tanaman Kelapa	Jumlah Kepala Keluarga	:	**Usaha *Brokering* (Perantara)**
	Populasi Tanaman Kelapa	:	**Rata-rata 5-10 Pohon Per KK**
	Jenis Usaha	:	**Usaha *Brokering* (Perantara)**
	Bentuk Usaha	:	**Penjualan Buah Kelapa**

Analisis Permasalahan :	
a. Buah Kelapa bagi masyarakat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis terkecuali dimanfaatkan pada moment tertentu seperti acara pernikahan, aqiqah atau kegiatan lainnya.	
b. Masyarakat tidak memiliki alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomis dari Buah Kelapa	
Analisis Pertimbangan Usaha	
a. BUMDes dapat menfasilitasi dalam memberikan suplai terhadap kebutuhan Kelapa pada Pedagang di Luar Kabupaten Enrekang	
b. Menambah Tingkat Penghasilan Masyarakat	
c. Menjadi Sarana untuk Menyerap Tenaga Kerja	
Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes	
a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Kelapa	
b. Inovasi Produk Buah Kelapa (Kopra)	
Estimasi Keuntungan BUMDes	
Pembelian dan Penjualan Kelapa	
Pengadaan Mobil Truk	**400.000.000,-**
Harga Beli Pedagang	5.000-6.000,-/Buah
Harga Beli dari Petani	1.500,-/Buah
Jumlah Produk 1 Kali Pengantaran	1.000 Buah
Keuntungan Penjualan	4.500.000,-
Biaya Bahan Bakar, dll	2.000.000,-
Keuntungan Bersih BUMDes	2.500.000,-
Estimasi Pengantaran 2 Kali Sebulah	**5.000.000,-**
Ekspedisi Pengangkutan	
Keuntungan Ekspedisi Pengangkutan	5.000.000,-/Minggu
Pembelian dan Penjualan Kopra	
Harga Beli	**2.000,-/Kg**
Biaya Jual Kopra	**4.000,-/Kg**
Pengangkutan Kopra (Daya Muat)	**3 Ton**
Keuntungan Pembelian	**6.000.000,-**
Biaya Pengangkutan	**2.500.000,-**
Keuntungan Pengangkutan	**3.500.000,-**

Hasil analisis dan pencermatan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan bahwa Buah Kelapa selama ini dianggap tidak memberikan nilai ekonomis cukup berarti kepada masyarakat. Mempertimbangkan bahwa kebutuhan akan Buah Kelapa di daerah perkotaan sangatlah tinggi, demikian pula pada beberapa pabrik penyulingan Minyak Kelapa, menyikapi kondisi tersebut dan setelah dilakukan survey pasar bahwa peluang pengembangan usaha ini dianggap dapat memberikan dukungan pada usaha BUMDes.

Risiko terbesar dari usaha ini adalah Penggunaan Dana yang cukup besar dalam hal Pengadaan Kendaraan untuk mendukung Proses Penjualan, namun jika menimbang asas manfaat dari pengadaan Kendaraan Truk tersebut secara umum memiliki beberapa alternatif penggunaan, seperti Ekspedisi Pengiriman Barang ketika Pengiriman Kelapa dilakukan maka pada saat akan kembali Truk dapat digunakan untuk kegiatan ekspedisi pengiriman barang dari Cabang Grosir ke Daerah Tujuan. Keberadaan Truk tersebut juga dapat difungsikan untuk Pengantaran Jagung ke Gudang Pembeli dengan Biaya Sewa ditanggung oleh Pembeli, kemudian untuk kegiatan lainnya juga dapat difungsikan seperti Pengangkutan Kopra, serta Distribusi hasil Alam Desa Ranga.

2) Analisis Pengembangan Usaha Bidang *Bolding*

Jenis Potensi			**Bentuk Usaha**
Peternakan Sapi	Potensi Jumlah Peternak	:	**175 Kepala Keluarga**
	Jenis Usaha	:	***Bolding* (Usaha Bersama)**
	Bentuk Usaha	:	**Penggemukan Sapi**
	Model Usaha	:	**Penyediaan Bibit/Anakan Sapi**

Analisis Permasalahan :	
a. Potensi Jumlah Ternak di Desa Ranga mulai Berkurang, dikarenakan Masyarakat harus melakukan Penjualan Sapi untuk Biaya yang sifatnya mendesak	
b. Jumlah Peternak Semakin Berkurang	
c. Indukan Sapi semakin berkurang	
Analisis Pertimbangan Usaha	
a. Keinginan Masyarakat Mengembangkan Ternak Sapi Cukup Tinggi	
b. Potensi Pakan banyak Tersedia	
c. Lahan Pengembang Biakan Cukup Tersedia	
d. Keamanan Terhadap Unsur Pencurian Terjaga	
e. Keberadaan Masyarakat Adat dapat Menjadi Sarana Pengembangan Usaha dengan Skala Besar	
f. Menyerap Tenaga Kerja	
Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes	
a. Penggemukan Sapi	
b. Pengadaan Sapi Perah	
c. Suplai Indukan Sapi Kepada Petani dengan Sistem Angsuran	
Model Pengembangan Usaha (Estimasi Waktu 6 Bulan)	
Suplai Anakan Sapi	
a. Kelompok Peternak	25 Ekor
b. Kelompok Masyarakat Adat	10 Ekor
Harga Anakan Sapi	7.000.000,-/Ekor
Modal yang dibutuhkan	245,000.000,-
Harga Jual Sapi Umur 1 Tahun	14.000.000,-
Keuntungan Penjualan	7.000.000,-
Pembagian Keuntungan	
Keuntungan Peternak (70%)	4.900.000,-/Ekor
Keuntungan BUMDes (30%)	**2.100.000,-/Ekor**
Alternatif Pengembangan Usaha	
Pengadaan Sapi Perah	**6 Ekor**
Harga Sapi Perah	**9.000.000,-/Ekor**
Harga Jual Ke Peternak	**12.000.000,-/Ekor**
Sasaran Peternak	**3 Orang**
Produk Susu Dua Ekor Sapi Per Hari	**10 Liter,-**
Produk Dangke untuk 10 Liter Susu	**10 Biji**
Harga Jual Dangke @20.000,-/Biji	**200.000,-/Hari**
Kemampuan Pengembalian Harga Sapi dari Petani	**2.000.000,-/Bulan**
Masa Pengembalian	**6 Bulan**

Usaha dalam bentuk *Bolding* (Usaha Bersama) dapat dikatakan sasarannya adalah Peternak. Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menghindari timbulnya kecemburuan sosial dikalangan peternak, maka setiap tahunnya sesuai estimasi masa penjualan untuk Penggemukan Sapi yakni 6 Bulan, maka setiap Tahunnya Peternak yang dilibatkan sebanyak 70 Orang, dimana sasaran untuk kegiatan ini adalah yang tidak memiliki Sapi untuk di Ternakkan. Sementara untuk Pengembangan Sapi Perah dengan pola sistem angsuran juga estimasi pengembaliannya selama 6 Bulan, artinya dalam satu tahun BUMDes juga dapat memberikan dukungan kepada masyarakat sebanyak Enam orang Peternak yang dianggap memiliki Potensi dan Kemampuan dalam hal pengelolaan Produk Dangke.

3) Analisis Pengembangan Usaha Sosial

Jenis Potensi			Bentuk Usaha
Pengrajin Gula Aren	Jumlah Pengrajin	:	**Setiap Dusun rata-rata 2 Orang**
Kapasitas Produk dari	Jumlah Produksi	:	**65 Kilo Perminggu**
Pohon Aren Rata :	Jenis Usaha	:	***Renting* (Usaha Penyewaan)**
500 Liter/Perminggu	Bentuk Usaha	:	**Penyewaan Mesin Oven Gula Semut**

Analisis Permasalahan :
a. Penjualan Gula Aren hanya disesuaikan dengan Pesanan
b. Pengelolaan Produksi tidak bersifat Kontinyu
c. Biaya Produksi Tinggi khususnya untuk Proses Penjualan
d. Nilai Jual Produk Gula Aren Masih Rendah
e. Masyarakat Belum Mampu melakukan Inovasi Produk
f. Jumlah Pengrajin Semakin Berkurang
Analisis Pertimbangan Usaha

a. Ketersediaan Bahan Baku Cukup Besar	
b. Mutu Gula Aren selalu terjaga	
c. Menjadi salah satu alternatif pengembangan Home Industri	
d. Pemberdayaan untuk Ibu-Ibu	
e. Sarana Pengembangan Potensi Lokal	
f. Menyerap Tenaga Kerja	
g. Meningkatkan Penghasilan Masyarakat	
Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes	
a. Inovasi Pembuatan Gula Semut	
b. Penyewaan Oven untuk Gula Semut	
Estimasi Keuntungan BUMDes	
Pembuatan Gula Semut	
Rata-Rata Jumlah Sadapan Air Nira	500 Liter/Minggu
Perbandingan Penggunaan Air Nira	
a. Gula Merah untuk Per Kilogram	8 Liter
Jumlah Produksi Perminggu	62.5 Kg/Minggu
b. Gula Semut untuk Per Kilogram	7 Liter
Jumlah Produksi Perminggu	71.4 Kg/Minggu
Perbandingan Harga	
a. Gula Merah untuk Per Kilogram	20.000,-/Kg
b. Gula Semut untuk Per Kilogram	27.000.-/Kg
Estimasi Biaya Produksi	
a. Gula Merah	200.000,-/Minggu
b. Gula Semut	175.000,-/Minggu
Usaha BUMDes	
Harga Mesin Open Gula Semut	**18.500.000,-**
Kapasitas Pengering	100 Kg
Biaya Sewa Oven Per Kg	5.000,-

Capacity Development yang diharapkan dari Pengelolaan Usaha ini tidak lain adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang menggeluti usaha Gula Aren. Sementara dari sudut pendapatan terhadap pengelolaan BUMDes, maka usaha ini tidak diorientasikan memperoleh banyak keuntungan, artinya nilai lebih dari usaha yang diperoleh BUMDes peruntukannya hanya agar Modal yang dikeluarkan dapat kembali, dan terpenting adalah peningkatan terhadap kesejahteraan dar pengrajin gula aren

4) Analisis Pengembangan Usaha Rintisan

Jenis Potensi			Bentuk Usaha
Buah Pisang	Jumlah Kepala Keluarga	:	**399 Kepala Keluarga**
	Populasi Tanaman Pisang	:	**Rata-rata 10-20 Pohon Per KK**
	Jenis Usaha	:	**Usaha Sosial**
	Bentuk Usaha		**Home Industry**
	Model Usaha	:	**Inovasi Produk Buah Pisang**
Briket	Bahan Baku	:	**Sabuk Kelapa**
	Jenis Usaha	:	**Usaha Sosial**
	Bentuk Usaha		**Pembuatan Briket**
Pembuatan Wadah Tanam	Bahan Baku	:	**Tongkol Jagung, Kulit Kemiri**
	Jenis Usaha	:	**Usaha Sosial**
	Bentuk Usaha		**Pembuatan Wadah Tanam**

Terhadap semua jenis usaha yang bersifat rintisan maka pengembangannya akan dilakukan setelah mencermati pelaksanaan program yang dijadikan Skala Perioritas Unggulan, sebab dari keuntungan usaha tersebut nantinya akan dijadikan sebagai modal untuk membiayai usaha rintisan setelah Sumber Daya Manusia disiapkan.

5) Analisis Konsep *Destinity* (Memastikan Pelaksanaan)

Konsep Destinity dalam Pendekatan Model *Asset Based Community Development*, pada dasarnya juga lebih bersifat penguatan, namun dari sisi keberlanjutan terhadap usaha BUMDes hal ini menjadi penting, dikarenakan banyak Usaha yang dikelola oleh BUMDes tidak berjalan secara baik sebab masyarakat tidak menjadi bagian dari usaha tersebut. Sifat *Capacity Development* yang ingin ditumbuhkan dalam tahapan ini adalah Penghargaan atas Aspirasi dan Keinginan yang menjadi Harapan Masyarakat. Hal lainnya yakni Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada BUMDes akan semakin meningkat serta mereka juga dapat melibatkan diri secara optimal terhadap keberlanjutan BUMDes sebab merasa bagian dari usaha yang dikembangkan.

6) Arah Pengembangan BUMDes

Pengembangan terhadap BUMDes yang diharapkan melalui Pendekatan *Asset Based Community Development* yakni meningkatkan Pendapatan usaha dan juga mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), selain itu melalui konsep ini dan dengan adanya keterlibatan masyarakat secara utuh terhadap pengembangan BUMDes, maka arah kebijakan untuk menjadikan BUMDes Ranga dapat dilakukan. Arah kebijakan yang menjadi tujuan utama terhadap penerapan Asset Based Community Development yakni menjadikan semua potensi yang dimiliki oleh Desa dan kemudian dikembangkan menjadi usaha BUMDes, dari proses ini tentunya diaharapkan mampu merubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih sejahtera, dan begitupula terhadap BUMDes melalui dukungan dari masyarakat maka tingkat keberlanjutannya akan terwujud.

Penyerahan keputusan kepada masyarakat dimaksud untuk membangun lahirnya *Community Capacity Development* atau meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain pada konsep *Asset Based Community Development* posisi masyarakat tidak lagi sebagai unsur yang selalu diidentikkkan dengan penerima, namun pada konsep ini peran masyarakat lebih diperbanyak, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan BUMDes yang berkelanjutan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Pendekatan dengan *Asset Based Community Development* dapat dilihat bahwa tujuan utama yang hendak dicapai adalah mendorong masayarakt untuk dapat terlibat langsung terhadap pengelolaan BUMDes, dan dalam konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang diharapkan pada makna dan maksud dari Partisipasi. Penerapan Konsep *Asset Based Community Development* jika mampu ditelusuri melalui tahapan-tahapan pengelolaannya maka kesemuanya berbasis pada Partisipasi Masyarakatm artinya secara tidak langsung dengan penerapan Konsep ini mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung menganalisis masalah yang ada di komunitas mereka hal ini dapat dilihat pada Aspek-Aspek Pengelolaan *Asset Based Community Development* dan juga termasuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada melalui identifikasi potensi serta harapan mereka dan dituangkan pada tahapan *Discovery* dan *Dreams.* Sementara pada tahapan pengambilan keputusan terhadap program yang akan dikelola BUMDes, dituangkan pada Konsep *Define*, dimana keputusan terhadap usaha BUMDes dikembalikan persetujuannya kepada masyarakat didasarkan pada analisis yang telah disusun dalam bentuk program oleh Pemerintah Desa bersama BUMDes. Adapun implementasi atau keterlibatan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program menjadi bagian pada Tahapan *Destinity.*

Konsep *Asset Based Community Development* dalam maknanya adalah Pemberdayaan Masyarakay Berbasis Potensi, tentunya roh yang ingin dicapai dalam Konsep ini tidak lain bagaimana masyarakat tanpa adanya paksaan berkeinginan untuk terlibat dan merumuskan program-progam yang beriorientasi pada peningkatan kesejahteraan masayarakat. Konsep ini melihat bahwa unsur terpenting dalam meningkatkan taraf hidup pada sebuah komunitas adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga diperlukan model pendekatan agar masyarakat secara tidak langsung memiliki keterikatan untuk terlibat memikirkan berbagai permasalahan sekaligus mencari solusinya.

Pembahasan

Pengembangan Usaha BUMDes dengang Pendekatan *Asset Based Community Development*

Permasalahan umum yang banyak dihadapi oleh BUMDes saat ini secara umum tidak terletak pada persoalan Pembiayaan dan juga Potensi yang dimiliki, namun lebih kepada pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa. Kondisi inilah yang menjadi dasar sehingga Konsep Pendekatan dengan Model *Asset Based Community Development* dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes. Kondisi BUMDes Ranga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dasarnya masih berjalan, akan tetapi partisipasi terhadap perekonomian sangat belum maksimal, permasalahan utama yang dihadapi adalah BUMDes dalam menentukan jenis usahanya belum didasari atas potensi di Desa, selain itu disisi lain masyarakat memiliki keinginan untuk memberdayakan dirinya pada usaha BUMDes, akan tetapi mereka juga merasa bingung sebab hampir semua usaha BUMDes yakni Penyewaan Moleng, dan Usaha Rias Pengantin lebih dominan hanya dapat dikelola oleh sedikit orang. Kondisi inilah yang menurut pandangan dari Syarifuddin Yusuf (2023) dikatakan sebagai *Job Insecurity* atau kondisi dimana masyarakat merasa kurang nyaman untuk melibatkan diri dalam kegiatan usaha BUMDes, sebab mereka khawatir justeru

keterlibatan masyarakat pada usaha tersebut akan menimbulkan hal yang tidak berkenan.

Mencermati kondisi usaha BUMDes tersebut dan ketika dilakukan konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Desa terhadap Pemanfaatan Potensi yang ada di Desa, secara umum hampir semua pihak memahami dan mengetahui terdapat banyak potensi yang cukup dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, namun mengkaji lebih jauh untuk dijadikan sebagai unit usaha belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini pada dasarnya sejalan dengan hasil penelitian dari Yulianto (2021) bahwa Desa selama ini hanya sebatas memahami tentang potensi-pitensi yang mereka miliki, namun untuk melakukan kajian secara lebih jauh terhadap potensi tersebut sehingga nantinya dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes masih belum dilakukan. Olehnya itu menjadi sangat perlu bagi semua unsur di Desa untuk melakukan pemetaan terhadap semua potensi yang dimiliki dan salah satu alternatif dapat digunakan yakni dengan pendekatan *Asset Based Community Development.*

Menegaskan hal tersebut Theofillius Baratova (2021) dalam hasil yang diperoleh pada penelitiannya juga menekankan bahwa model yang dituangkan dalam Konsep *Asset Based Community Development,* dianggap sangat baik dalam mempetakan potensi yang dimiliki oleh Desa, sebab metode yang digunakan sedikit berbeda dengan konsep pemetaan potensi lainnya, dimana dalam Konsep *Asset Based Community Development* penggalian potensi yang ada di Desa difokuskan pada perlibatan masyarakat, dan cakupannya tidak hanya sebatas pada Potensi Sumber Daya Alam saja, namun terkait semua Potensi baik itu Manusia, Kondisi Sosial dan juga Kondisi Sarana Prasarana di Desa.

Menghubungkan Pendekatan dengan Konsep *Asset Based Community Development* atau dapat dimaknai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi jika dihubungkan dengan BUDes, khususnya untuk pengembangan usaha dianggap sangat tepat, sebab dalam Konsep *Asset Based Community Development*, analisis permasalahan diawali dengan mempetakan semua bentuk kondisi yang ada di desa termasuk mencermati solusi terhadap permasalahan tersebut melalui Konsep Aspek-Aspek dalam Konsep Konsep *Asset Based Community Development.* Berdasar pada alur inilah langkah pemberdayaan dapat dimulai untuk dilakukan dengan menggali potensi yang ada di Desa dan juga harapan-harapan yang diinginkan oleh masyrakat melalui Tahapan *Discovery* dan *Dream.* Tahapan ini menjadi sangat penting sebab dari sinilah Titik Tolak Pemerintah dan juga BUMDes mampu mengetahui kondisi sebenarnya dari semua aspek yang ada di desa termasuk harapan dari masyarakat, dan pada Tahapan *Design* proses singkronisasi menjadi lebih mudah.

Maksud Sinkronisasi dalam hal ini dimana pada Tahapan *Design* merupakan kewenangan dari Pihak Pemerintah Desa dan juga BUMDes untuk melakukan Analisis terhadap semua bentuk Potensi yang diharapkan oleh masyarakat dapat dikembangkan, tentunya dasar pertimbangan untuk menentukan kelayakan suatu usaha ditinjau dari asas keberlanjutannya. Ha tersebut juga oleh Syarifuddin Yusuf (2022) bahwa langkah singkronisasi menjadi penting sebab didalamnya harus mampu menjabarkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan sejauh mana kemampuan dari Pemerintah Desa dan BUMDes menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan.

Hidayati Amelia Rahayu (2022) juga menekankan bahwa dalam Konsep *Asset Based Community Development*, khususnya pada Tahapan *Design* maka peran dari Pemerintah desa dan juga BUMDes adalah melakukan pencermatah secara akurat tentang Usaha yang akan dilakukan dan tentunya harus berdasar pada hasil analisis pada Tahapan *Discovery* dan *Dream,* sebab disana terdapat wujud keinginan dan harapan dari masyarakat. Sementara pada Tahapan selanjutnya adalah Pemerintah Desa dan BUMDes kemudian melakukan sosialisasi terhadap *Design* yang telah disusun kepada Masyarakat dalam rangka mendapatkan penguatan dalam arti kata bahwa usulan usaha yang disertai analisis sehingga sebuah potensi akan dikelola menjadi usaha BUMDes diperlukan kata “setuju” dari masyarakat. Hal ini menjadi perlu dilakukan sebagai bentuk pemberian hak dan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Terdapat hal yang menjadi sorotan dari Taufik Raharjo (2021) bahwa selama ini terjadi persepsi yang melihat bahwa untuk melakukan pengembangan sebuah usaha BUMDes selalu didasarkan pada persoalan aset dan kapasitas, padahal semua itu tidak akan menjadi berarti jika tidak terbangun komunikasi antara semua pihak khususnya dalam hal ini masyarakat dengan para Pengambil Kebijakan, olehnya itu dengan Konsep *Asset Based Community Development* salah satu yang dapat terbangun adalah Komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menyikapi hal tersebut Abdul Azis (2024) juga melihat bahwa Konsep yag ditawarkan oleh *Asset Based Community Development* pada dasarnya juga dapat menjadi sarana bagi semua pihak dalam meng *Up-Skilling* kemampuan yang mereka miliki, sebab tujuan utama dari

Konsep ini adalah menjaring semua informasi dan kemudian mengajak masyarakat untuk ikut bersama memecahkan permasalahan yang terjadi. Sehingga tujuan akhir dari pengembangan usaha BUMDes yang melibatkan masyarakat baik dalam pengembangan maupun pengelolaan akan terwjud secara sendirinya, karena telah terbangun rasa memiliki terhadap usaha yang akan dikembangkan BUMDes, sebab dalam pengusulan dan penerapannya semua didasarkan atas persetujuan masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*.

Konteks permasalahan yang sering menjadi sorotan pada pengelolaan BUMDes dihampir semua Desa, dimana Kategori Usaha yang dikelola tidak berjalan optimal dominan dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian disoroti oleh Taufik Raharjo (2021) bahwa titik masalah dari persoalan partisipasi masyarakat karena selama beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes tidak memungkingkan dimana masyarakat dapat terlibat secara langsung. Kondisi inilah yang namoak pada pengelolaan BUMDes di Desa Ranga, dimana tingkat keinginan dari masyarakat untuk dapat mendukung usaha BUMDes sangat terbatas, sebab usaha yang dikelola lebih bersifat personal atau usaha tersebut tidak dapat melibatkan banyak orang dan juga usaha lainnya hanya berfokus pada pemanfaatan aset, sehingga untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Desa Ranga bersama BUMDes mencoba melakukan pendekatan dengan konsep lain, dan dalam hal ini konsep yang dikembangkan yakni *Asset Based Community Development* atau pemberdayaan masyarakat berbasis potensi.

Pemberlakuan *Asset Based Community Development* atau pemberdayaan masyarakat berbasis potensi pada dasarnya baik langsung atau tidak langsung telah menjadikan partisipasi sebagai dasar utamanya, sebab semua bentuk jenis potensi yang ada di desa dan juga usulan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan BUMDes semuanya berdasar pada keinginan dan kemauan dari masyarakat, artinya bahwa Konsep ini rohnya adalah Pertisipasi Masyarakat. Persepsi inilah yang kemudian dipertegas Laelatul Udhiya (2024) dalam penelitiannya bahwa selama ini terkait anggapan tentang partisipasi lebih mengarah kepada bentuk keterlibatan secara langsung dari masyarakat, hanya saja yang tidak dipahami sebahagian orang adalah roh dari bentuk partisipasi sebenarnya orientasinya bukan hanya keterlibatan tersebut namun juga terkait perlibatan mental dan emosional, sebab dari sinilah akan timbul dorongan untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Hal tersebut menurut Syarifuddin Yusuf (2023) menjadi wajar sebab ketika seseorang merasa tidak dibutuhkan atau tidak paham terhadap hal-hal yang akan dikerjakan, tentunya mereka dengan sendirinya akan menjadi apatis, atau bermasa bodoh.

Berdasar pada kondisi inilah maka langkah yang ditempuh oleh BUMDes Desa Ranga sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Kiky Srirejeki (2020) bahwa salah satu solusi membenahi partisipsi masyarakat yang dianggap menjadi permasalahan klasik dalam pengelolaan usaha BUMDes, maka pendekatan yang dianggap paling ideal yakni melalui Konsep *Asset Based Community Development*, sebab dengan konsep ini baik secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat akan didorong untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap permasalahan sosial yang ada disekitar mereka, dan masukan inilah nantinya menjadi dasar bagi BUMDes untuk merumuskan usaha yang dianggap layak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang berbeda Abdul Azis (2024) melihat bahwa pendekatan Konsep *Asset Based Community Development,* sebenarnya menjadi sebuah sarana yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terlepas dari jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes, sebab melalui konsep ini masyarakat secara tidak langsung diajak untuk mampu mencermati tentang potensi yang ada disekelilingnya dan juga meningkatkan kemampuannya mencermati tentang analisis terhadap usaha yang akan dikembangkan BUMDes dihubungkan dengan sejauh mana usaha tersebut mampu mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan dengan Konsep *Asset Based Comunity Development* jika dicermati lebih jauh bagaimana bentuk konsep ini dilakukan pada dasarnya mulai dari awal pengelolaannya semua berbasis pada masyarakat, dapat dilihat pada penggalian aspek-aspek yang menjadi bagian dari konsep ini, dimana semua didasarkan pada kondisi yang benar-benar terjadi dan juga solusi serta pembagian kewenangan serta hak yang diinginkan oleh masyarakat dituangkan dalam setiap bagian. Selanjutnya pada langkah pemetaan potensi, semua basis informasi didasarkan pada semua bentuk kondisi yang ada di Desa, apakah itu mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana serta organisasi yang ada juga menjadi bagian dalam pemetaan atau pada konsep *Aseet Based Comunity*

Development disebut dengan *Discovery,* tahap ini semua informasi juga bersumber dari masyarakat, demikian pula untuk Tahapan *Dream* yang kadang menjadi satu ketika dilakukan wawancara atau observasi, semuanya didasarkan pada informasi yang menjadi harapan atau keinginan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan meraka.

Merujuk pada kondisi tersebut maka Hidayati Amelia Rahayu (2022) mengemukakan bahwa makna yang ada dalam partisipasi pada dasarnya juga menjadi roh dalam konsep *Asset Based Community Development*, sebab dari tahapan awal sampai diakhir konsep ini arah kebijakannya selalu bertumpu pada masyarakat, sehingga prinsip partisipasi tanpa harus dicermati secara lebih jauh telah terbangun, karena masyarakat secara langsung terlibat dalam menguraikan permasalahan, mencari solusinya kemudian mereka pulalah yang menentukan arah kebijakan dari tindak lanjut sebuah solusi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) Dalam Mengembangkan Usaha BUMDes Di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Konsep *Asset Based Community Development* merupakan sebuah model pemberdayaan untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam menentukan usaha BUMDes yang di anggap potensial.
2. Melalui Konsep *Asset Based Community Development* maka BUMDes Ranga telah dapat memepetakan potensi-potensi yang dianggap layak untuk dikembangkan menjadi usaha BUMDes.
3. Model pemberdayaan pada Konsep *Asset Based Commnity Development* merupakan pendekatan pengembangan usaha yang melihat dan memanfaatkan peran masyarakat dalam menentukan usaha yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan.

Saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Ranga untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Usaha yakni :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes, maka salah satu bentuk kebijakan yang perlu dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dan juga Pegelola BUMDes yakni menjadikan konsep *asset based community development* dalam menyusun perecanaan usaha BUMDes.
2. Mendukung Keberlanjutan setiap usaha BUMDes maka analisis dengan pendekatan *asset based community development* adalah sebuah solusi yang dapat diterapkan sebab hal paling utama dalam konsep ini adalah Penggalian Potensi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press

Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group

Abdul Azis, Sariana Damis, Arman. 2024. Analisis Perilaku Biaya Terhadap Profitabilitas pada UMKM Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare. Journal AK-99 Volume 4 Nomor 1, Mei 2024

Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.

Budi Sunarso. 2023. Sosiologi Pembangunan Desa. Ponorogo. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.

Chindra Bagas, M., Riska Alfiyah Solikhah, Siti Faroha, Vina Rahmawati. 2023. Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta. Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2023

Detik.com 2024. Setelah BUM Desa Berbadan Hukum Koresponden Ivanovich Agusta, dirilis pada Jumat, 02 Feb 2024 09:22 WIB. Laman :https://news.detik.com/kolom/d-7172898/setelah-bum-desa-berbadan-hukum.

Ervin, A. Irfandy Rustam, 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Repository IPDN http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12533

Faradhilla Andriyani, 2020. Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Volume 1 Nomor (1): Hal 31-41

Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungki Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2022. Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. Greenomika, Vol 4 No. 1 Juni 2022

Irfan Irenius Dwi Apriyanto Ananda Salim, Hendrawati Hamid. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Repository IPDN Submit pada 14 Juni 2024. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18736

Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44

Laelatul Udhiya, Rachmat Ramdani, Gun Gun Gumilar. 2024. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Jurnal Communnity Development Journal Vol.5 No. 3 Tahun 2024, Hal. 5434-5437

Lindi Widiastuti Solihat, Aan Julia. 2022. Strategi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Bandung Conference Series: Economics Studies Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 100-107

Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press

Ningsih Wahyuni, 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Peni Alvera, 2021. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu. Skripsi : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Rahmatullah, R., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2024). TINGKAT LITERASI KEUANGAN PENGELOLA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA BUMDES DESA ROSOAN KABUPATEN ENREKANG. *Journal AK-99*, *4*(2), 514-527.

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Siti Amerieska, I Made Narsa, Sri Ningsih. 2023. Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 06 No 02 Hal 173-189 Oktober 2023

Syarifuddin Yusuf, Yusran Bachtiar, Muh Rian Hidayat, 2023 Pengaruh Job Insecurity dan Iklim Organisasi Terhadap Loyalitas Pegawai Kantor Camat Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN. 2721-4907 Volume 4, Nomor 2, Oktober 2023

Syarifuddin Yusuf, Yusran Bahtiar, Arrahman, Aulia Ananda, Nufadilah, 2023. Peningkatan Skala Usaha BUMDes Anugrah Mandiri Carawali Melalui Pendampingan Manajemen Administrasi Dan Keuangan Yang Akuntabel. MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 8 Tahun 2022

Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023

Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kusmulyono 2021. Pendekatan Asset Based Community Development dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia (PERWIRA) Vol. 4 No. 2 (2021)

Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri. 2021. Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia Journal of Social Development Studies Volume 2, Issue 2, September 2021, pp. 43-54

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawan Herry Setyawan, Mansur, Betty Rahayu, dkk. 2022. Asset Based Community Development (ABCD). PT. Gaptek Media Pustaka. Samarinda.